

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF  
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi

**ENDANG FIRDAYANTI**

**NPM : C10160038**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**

**BANDUNG**

**2020**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF  
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung)**

**ENDANG FIRDAYANTI**

**NPM : C10160038**

Bandung, 9 Maret 2020

Pembimbing



**Dr. Erlynda Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.**

Mengetahui,

Ketua STIE Ekuitas

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



**Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP.**



**Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.**

**Tanggung Jawab Yuridis ada pada penulis**

**P E R N Y A T A A N**  
**PROGRAM SARJANA**

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian dari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, karena karya tulis ini ataupun sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 9 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,

**Endang Firdayanti**

**C10160038**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF  
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung)**

**Oleh :**

**Endang Firdayanti**

**Dibawah Bimbingan :**

**Dr. Erlynda Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner, populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *simple random sampling* dan sampel yang terpilih adalah 57 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah. Secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

**Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

***INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND ACCOUNTING STAFF COMPETENCE OF THE QUALITY LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT.***

***(Study At Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) In Bandung City)***

***Written by :***  
**Endang Firdayanti**

***Preceptor :***  
**Dr. Erlynda Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.**

***ABSTRACT***

*The study aims to determine influence of implementation of government accounting standards, internal control system, and accounting staff competence of the quality local government financial statement on Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in Bandung City.*

*The method used in this study is a quantitative method with a descriptive and verification approach. The data used by researchers are primary data in the form of questionnaires, the population in this study were Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in Bandung City. The sampling technique uses simple random sampling and the selected sample are 57 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). The statistical analysis used in this study is the validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression analysis, t test, F test and coefficient of determination.*

*The result of research showed that the mplementation of government accounting standards, internal control system, and accounting staff competence partially has a positive and significant impaction the quality local government financial statement. Simultaneously the implementation of government accounting standards, internal control system, and accounting staff competence has a positive and significant impaction the quality local government financial statement.*

***Keyword : Implementation of government accounting standards, internal control system, accounting staff competence, quality local government financial statement.***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Syukur *alhamdulillahirrabbi'l'amin* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan ridho-Nya, kesehatan dan rezeki yang diberikan-Nya serta selalu memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis curahkan pada Rasulullah SAW atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis mampu mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** dengan studi pada **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.

Selama penulis mempersiapkan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari orang-orang di sekitar penulis yang selalu memberikan semangat yang menjadi salah satu faktor dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Keluarga tersayang yaitu kedua orang tua, Ayah Oman Sulaeman dan Ibu Nani Nur'aeni yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi serta

dukungan moril maupun materil. Semua sangat berarti dan tidak ternilai bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

2. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
3. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP. Selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.
4. Dr. Dani Dagustani, Ir., MM. Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS.
5. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS.
6. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
7. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi.
8. Dr. Erlynda Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP. Selaku dosen pembimbing dan wali dosen yang telah membantu mengarahkan dan memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.
9. Dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis, serta staf BAAK, BAKU dan perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS.
10. Seluruh karyawan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang telah memfasilitasi dalam penyebaran kuesioner.
11. Sahabat penulis Nurul Hanissa, Ghina Umniati dan Herlina yang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

12. Teman seperjuangan Tuslykha Burhan yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk orangtua penulis, kakak dan adik penulis, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa kepada penulis sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta doanya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Bandung, 9 Maret 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Maksud Penelitian.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis.....	12
1.4.2 Kegunaan Secara Praktis.....	12
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	13
1.5.2 Waktu Penelitian.....	13
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN</b>	
<b>            HIPOTESIS PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	14

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan.....	14
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi.....	14
2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	15
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	16
2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	16
2.1.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	18
2.1.2.3 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan....	19
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal.....	21
2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.....	21
2.1.3.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	22
2.1.3.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal.....	24
2.1.3.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	27
2.1.4 Kompetensi Staf Akuntansi.....	28
2.1.4.1 Pengertian Kompetensi.....	28
2.1.4.2 Karakteristik Kompetensi.....	29
2.1.4.3 Komponen Kompetensi.....	30
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	33
2.1.5.3 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	33

2.1.5.4	Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	33
2.1.5.5	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	41
2.1.5.6	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laporan Keuangan.....	46
2.1.6	Penelitian Terdahulu.....	47
2.2	Kerangka Pemikiran.....	57
2.2.1	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	57
2.2.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	59
2.2.3	Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	60
2.2.4	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	62
2.3	Hipotesis Penelitian.....	66
<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
3.1	Objek Penelitian dan Gambaran Umum Instansi.....	67
3.1.1	Objek Penelitian.....	67
3.1.2	Gambaran Umum Instansi.....	67
3.1.2.1	Sejarah Singkat Kota Bandung.....	67
3.1.2.2	Visi dan Misi Kota Bandung.....	69

3.1.2.3	Struktur Organisasi.....	71
3.2	Metode Penelitian.....	72
3.2.1	Metode yang digunakan .....	72
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	73
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan sampel.....	78
3.2.3.1	Populasi Penelitian.....	78
3.2.3.2	Teknik Penentuan Sampel.....	80
3.2.4	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	84
3.2.4.1	Sumber Data.....	84
3.2.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	84
3.2.5	Metode Pengujian Data.....	87
3.2.5.1	Uji Validitas.....	87
3.2.5.2	Uji Reliabilitas.....	88
3.2.6	<i>Interval Succesive Method</i> .....	89
3.2.7	Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis Data.....	90
3.2.7.1	Analisis Data.....	90
3.2.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	91
3.2.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	93
3.2.7.4	Pengujian Hipotesis.....	94
3.2.7.5	Analisis Koefisien Determinasi.....	97
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>99</b>
4.1	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....	99
4.1.1	Karakteristik Responden.....	99
4.1.2	Hasil Uji Validitas.....	101

4.1.3 Uji Reliabilitas.....	104
4.2 Hasil	
Penelitian.....	107
4.2.1 Gambaran Variabel Penelitian.....	107
4.2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD Kota Bandung.....	108
4.2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pada SKPD Kota Bandung.....	112
4.2.1.3 Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung.....	114
4.2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.....	116
4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.....	118
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	118
4.2.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	125
4.2.2.3 Uji Signifikansi t (Parsial).....	127
4.2.2.4 Uji Signifikansi F (Simultan).....	129
4.2.2.5 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	130
4.3 Pembahasan.....	131

4.3.1	Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung.....	131
4.3.1.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD Kota Bandung.....	131
4.3.1.2	Sistem Pengendalian Internal Pada SKPD Kota Bandung.....	133
4.3.1.3	Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung.....	134
4.3.1.4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.....	134
4.3.2	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.....	136
4.3.2.1	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	136
4.3.2.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.....	138

4.3.2.3 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.....	139
4.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	140
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>142</b>
5.1 Kesimpulan.....	142
5.2 Saran.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kota Bandung.....	3
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	75
Tabel 3.2	Daftar SKPD Kota Bandung.....	79
Tabel 3.3	Sampel SKPD Kota Bandung.....	82
Tabel 3.4	Penilaian skala <i>likert</i> .....	85
Tabel 3.5	Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden.....	86
Tabel 4.1	Karakteristik Responden berdasarkan Usia.....	99
Tabel 4.2	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	100
Tabel 4.3	Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	100
Tabel 4.4	Karakteristik Responden berdasarkan Lama Bekerja.....	101
Tabel 4.5	Hasil uji validitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	102
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal.....	103
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Kompetensi Staf Akuntansi.....	103
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	104
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	105

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal.....	105
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Kompetensi Staf Akuntansi.....	106
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	107
Tabel 4.13 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	108
Tabel 4.14 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Pengendalian Internal.....	112
Tabel 4.15 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kompetensi Staf Akuntansi.....	114
Tabel 4.16 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	116
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (K-S).....	122
Tabel 4.18 Hasil uji Multikolinearitas.....	123
Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	125
Tabel 4.20 Hasil Uji Signifikan t (Parsial).....	127
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikan F (Simultan).....	130
Tabel 4.22 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	130

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Paradigma Penelitian.....	65
Gambar 3.1	Struktur Organisasi.....	71
Gambar 4.1	Garis Kontinum Kategori Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	111
Gambar 4.2	Garis Kontinum Kategori Sistem Pengendalian internal.....	114
Gambar 4.3	Garis Kontinum Kategori Kompetensi Staf Akuntansi.....	116
Gambar 4.4	Garis Kontinum Kategori Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	118
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas Histogram.....	120
Gambar 4.6	Hasil Uji Normalitas Plot.....	121
Gambar 4.7	<i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas.....	124

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Tabulasi Data Kuesioner
Lampiran 4	Hasil Perhitungan SPSS
Lampiran 5	Tabel r, tabel t dan tabel F
Lampiran 6	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	<i>Photocopy</i> Kartu Bimbingan
Lampiran 8	Surat Permohonan Perubahan Judul
Lampiran 9	Lembar Saran Revisi Dari Penguji
Lampiran 10	Lembar Persetujuan Perbaikan (revisi) Skripsi
Lampiran 11	Surat Keterangan Revisi
Lampiran 12	Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia pada saat ini mulai mendapat perhatian semenjak menguatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik (Sundari dan Rahayu, 2019). Dalam konteks organisasi pemerintahan, pengertian dari akuntabilitas publik merupakan informasi atas aktivitas serta kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan atas misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bagi pemerintah daerah sudah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencerminkan tertib dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu terdapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan tersebut, yang menjadi dasar atas pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015). Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan secara efektif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik kualitatif yang merupakan indikator utama dalam pelaporan keuangan, sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya antara lain :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami.

Dalam Laporan Keuangan, informasi yang disajikan bisa saja relevan. Akan tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan laporan keuangan yang menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercayai oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan

pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus di audit dan dalam hal ini di audit oleh BPK. Laporan keuangan di audit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah memiliki kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan (Firman, 2017).

Meskipun pada peraturan perundang-undangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, nyatanya pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang. Penerapan sistem keuangan pada praktiknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya (Jannaini, 2012:4). Apabila dalam penerapan tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan suatu daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, dan ketidakefektifan pemerintah daerah selama tahun 2014-2018. Badan Pemeriksa keuangan akan memberikan opini kepada pemerintah Kota Bandung atas LKPD Kota Bandung. Berikut adalah opini BPK atas LKPD Kota Bandung dari Tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Opini</b>	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

**Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). IHPS I 2019**

Penyebab utama LKPD Kota Bandung dari tahun 2014-2018 sulit untuk memperoleh opini WTP yaitu terkait dengan permasalahan aset yang sulit untuk diselesaikan. Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa menjelaskan bahwa ada sejumlah masalah administratif di pemerintah Kota Bandung yang belum dituntaskan khususnya dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2018, Seperti pencatatan piutang sewa tanah, pengelolaan aset hingga pencatatan utang jangka pendek yang tidak rinci (Syifa, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa untuk Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan atas opini LKPD, yaitu pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala BPK Kantor Wilayah Jawa Barat Arman Syifa, mengungkapkan bahwa tidak sedikit pemerintah daerah terlena akan keberhasilan penyelenggaraan laporan keuangan. Hal tersebut juga tak jarang terdapat permasalahan atas pembuat laporan yang tadinya baik menjadi menurun kualitasnya dari tahun ke tahun. Banyak Pemerintah Daerah yang juga lalai, yang dulunya sudah wajar pun bisa jadi ada pengecualian apabila tidak dijaga proses pengelolaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung harus menjaga konsistensi kualitas penyelenggaraan laporan, serta menjaga kredibilitas dari pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung (Syifa, 2019).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan pemerintah daerah di Indonesia pada saat ini yaitu semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan dan penyimpangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjurus ke tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa setiap Kementerian atau Lembaga dapat menggunakan anggarannya secara efektif, sehingga pelaksanaan APBN pun akan semakin baik. Hal tersebut memberikan kontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (Mulyani, 2018).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan keuangan tahun anggaran 2018 di Pemerintah Kota Bandung. Dari audit selama 2 bulan tersebut, BPK mengapresiasi kemajuan laporan keuangan pemerintah kota Bandung. Namun, masih banyak pemda yang juga lalai, yang dulunya sudah WTP pun bisa jadi ada pengecualian kalau tidak dijaga proses pengelolaannya, Oleh karena itu ia berpesan kepada Pemerintah kota Bandung untuk terus menjaga konsistensi kualitas penyelenggaraan laporan (Syifa, 2019).

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong cepat seluruh kementerian atau lembaga pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat WTP dari hasil laporan keuangan mereka oleh BPK. Kenyataannya, meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Sri mulyani menjelaskan, masih banyak kementerian atau lembaga pemerintah daerah meraih predikat WTP itu merasa sudah cukup. Padahal predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Jika laporan keuangan pemerintah meraih predikat WTP, mereka harus mengevaluasi kembali apa saja yang bisa dimaksimalkan untuk efisiensi anggaran (Mulyani, 2018).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 kepada BPK Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Barat. Data yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ini yaitu laporan pengelolaan keuangan pembangunan di Jawa Barat. Menurut Ridwan Kamil, data tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lingkup pemeriksaan pada LKPD 2018 yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan selisih anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurutnya, dana APBD hanya mampu membiayai 10% pembangunan. Padahal secara teori ada tujuh sumber dana yang bisa dimanfaatkan kepala daerah, yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten atau kota, pinjaman bank, dana Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah luar negeri, dan dana umat (Kamil, 2019).

Indikator dalam laporan keuangan misalnya, keterandalan sistem. Laporan keuangan yang baik yaitu laporan keuangan yang memiliki keterandalan dalam penyajian laporan keuangan. Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan, selain menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas juga diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang disingkat (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Yunita, 2015).

Dalam pengelolaan kualitas laporan keuangan pemerintahan, terdapat pengendalian internal. Pengendalian Internal meliputi organisasi yang

dikoordinasikan dengan tujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga diterapkannya pengendalian internal. Laporan keuangan yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi dan efektivitas (Udiyanti dkk, 2014).

Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai. Sistem pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas operasi suatu organisasi dengan alasan bisnis yang mendasar. Pengendalian internal yang menyatu mendorong peningkatan kualitas dan inisiatif, menghindari biaya yang tidak seharusnya dan menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan (Susanto, 2017:95).

Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu usaha untuk mewujudkan penerapan standar akuntansi yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan selain menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas juga diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Sihite dan Holiawati, 2017).

Kompetensi Staf Akuntansi adalah salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan (Yunita, 2015). Seperti yang diketahui proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kriteria suatu organisasi dalam suatu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh staf akuntansi sendiri, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dkk, 2014).

Peran penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting untuk menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Selain pengendalian internal yang baik dalam sebuah perusahaan, penyusunan laporan keuangan hendaknya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Hal ini dapat disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu aset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Abel, 2015).

Heni dan Euis (2014) menyatakan bahwa aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor I Tahun 2017 pasal 2 ayat 6 menjelaskan tentang kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Kompetensi staf akuntansi berarti kemampuan yang harus dimiliki oleh staf akuntansi berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan, kompetensi staf akuntansi adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan agar penyajian laporan keuangan memiliki kualitas informasi yang baik, sehingga dapat berguna bagi pengguna informasi, karena sebuah sistem informasi bagaimanapun bagusnya, tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalani oleh pelakunya (Sulfiyah, 2018).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan diatas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung?
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung?
4. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung?
5. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai topik penelitian yang diambil peneliti mengenai pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Pada SKPD Kota Bandung, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana di STIE Ekuitas Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka kegunaan secara teoritis penelitian pada penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak lain yang meneliti khususnya di bidang akuntansi sektor publik dengan kajian yang sama yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.

#### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian Praktis**

#### 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung. Serta digunakan untuk bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dengan

tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pada bidang akuntansi sektor publik juga dapat memberikan kontribusi terutama pemerintahan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan dalam menambah wawasan dan pengalaman terutama terkait dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan melaksanakan penelitian pada SKPD Kota Bandung.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Akuntansi Pemerintah**

**2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Nordiawan dkk. (2009:1) Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu ; pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Elsyie dkk. (2016:17) Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Dilihat dari fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan.

Berdasarkan kedua pengertian akuntansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Elsye dkk. 2016:17).

#### **2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Nordiawan dkk. (2009:1) akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Sedangkan dalam buku Elsy dkk. (2016:16), Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana. Sektor publik merupakan organisasi kompleks yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian lebih variasi. Tidak terkecuali bagi *stakeholder* sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi, baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal dari organisasi atau lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan jasa dengan tujuan untuk menyediakan informasi berupa informasi keuangan yang bersifat keuangan pemerintahan dengan tujuan

untuk pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan.

## **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan**

### **2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis kas menuju akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang

belum siap menerapkan SAP berbasis akrual. Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Standar Akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Selanjutnya untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi pemerintahan harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran dana publik (Sari, 2013).

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. (Sari, 2013).

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar

periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Sari, 2013).

#### **2.1.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2010:137).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan Pemerintahan (Mahmudi, 2011:271).

### **2.1.2.3 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan terdiri dari :

#### **LAMPIRAN I**

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  - a. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.
  - b. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis kas.
  - c. PSAP 03 Laporan Arus Kas.
  - d. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - e. PSAP 05 Akuntansi Persediaan.
  - f. PSAP 06 Akuntansi Investasi.
  - g. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap.
  - h. PSAP 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan.
  - i. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban.
  - j. PSAP 10 Koreksi, Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Estimasi yang Tidak Dilanjutkan.
  - k. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi.
  - l. PSAP 12 Laporan Operasional.

#### **LAMPIRAN II**

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - a. PSAP No 01 tentang Penyajian Lpaoran Keuangan.
  - b. PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

- c. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas.
- d. PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan.
- f. PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi.
- g. PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- h. PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i. PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
- j. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
- k. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, PSAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dan daerah berupa :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah akan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain ; Pemerintahan (eksekutif),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara.

### **2.1.3 Sistem Pengendalian Internal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengertian sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Agoes (2012:100), suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dalam suatu entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan.

- b. Efektivitas dan Efisiensi operasi Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

#### **2.1.3.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Internal melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang menciptakan pengelolaan pemerintah baik pusat maupun daerah berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah :

1. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian internal yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal yang dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Dengan demikian pengendalian internal yang memadai akan menciptakan tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik (Sari,2013).

Selanjutnya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah).

Secara konsep pelaksanaan pengendalian internal diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Penerapan peraturan pemerintah ini di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian internal tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Sari, 2013).

Walaupun pengendalian internal telah disusun dan diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintahan, pada dasarnya pengendalian internal memiliki keterbatasan. Diantaranya, penyebab tidak efektifnya suatu pengendalian internal adalah karena adanya keterbatasan dalam pertimbangan, kesalahan menterjemahkan instruksi, pelanggaran oleh manajemen, kolusi dan faktor keterbatasan biaya dalam pengendalian internal (Sari, 2013).

### **2.1.3.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assesment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), aktivitas pengendalian (*control activities*), dan pemantauan

(*monitoring*). Dari kelima Komponen tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko yang dimaksud terdiri dari :

- a. Identifikasi Risiko
- b. Analisis Risiko

### 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Riviui atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan riviui atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting

### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan Pengendalian Internal adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal, melalui :

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Tindak Lanjut

#### **2.1.3.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendorong adanya efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Adapun tujuan pengendalian internal menurut Susanto (2017:88) tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa alasan utama digunakannya sistem pengendalian adalah untuk membantu mencapai tujuan dan mengurangi resiko. Maka sesuai dengan alasan diatas untuk menerapkan pengendalian dalam

mengelola resiko di suatu organisasi perusahaan, manajemen perusahaan perlu mengetahui dahulu aktivitas organisasi yang harus dikendalikan, selanjutnya seperti dijelaskan diatas, mengidentifikasi potensi risiko bisnis yang diperkirakan akan muncul, menganalisisnya serta melakukan tindakan yang diperlukan (Susanto, 2017:90).

## **2.1.4 Kompetensi Staf Akuntansi**

### **2.1.4.1 Pengertian Kompetensi**

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Wibowo (2016:271) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dirinci oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Orang yang kompeten berarti orang yang memiliki kualitas hasil pekerjaan yang baik.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-

sikap, dan nilai-nilai pribadi dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

#### **2.1.4.2 Karakteristik Kompetensi**

Kompetensi memiliki aspek-aspek tertentu yang mendorong dirinya untuk melakukan kinerja yang optimal, maka dari itu tidak semua aspek-aspek pribadi seseorang merupakan bagian kompetensi. Menurut Ruky (2014:123), mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi, yaitu sebagai berikut :

a. *Knowledge* (Pengetahuan)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang tentang hal spesifik. *Knowledge* (Pengetahuan) adalah sebuah kompetensi yang kompleks. Angka (nilai) hasil yang diperoleh seseorang dalam tes-tes pengetahuan seringkali gagal meramalkan prestasi kerjanya dalam melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya karena tes-tes tersebut belum atau tidak berhasil mengukur pengetahuan (*skills*) sebagaimana mereka sebenarnya digunakan dalam pekerjaan.

b. *Skills* (Keahlian atau Keterampilan)

*Skills* adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tugas tertentu yang bersifat fisik maupun mental.

c. *Motives* (Motif)

*Motives* (motif) adalah hal-hal yang seseorang secara konsisten selalu dipikirkan atau diinginkan yang kemudian mendorongnya

melakukan sebuah tindakan. *Achievement Motivation* menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan secara konsisten selalu menetapkan sasaran atau target yang menantang untuk dirinya sendiri, menerima tanggung jawab untuk mencapainya dan menggunakan umpan baik yang diterima untuk berprestasi lebih baik.

d. *Traits*

Traits adalah ciri-ciri atau karakteristik individu khusus yang bersifat fisik juga emosional (reaksi yang konsisten terhadap situasi-situasi dan informasi).

e. *Self Concept* (Konsep Diri)

Konsep diri adalah sikap, nilai, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Konsep diri terdiri dari:

- a) Rasa percaya diri, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia akan bisa berprestasi dalam situasi apapun.
- b) Nilai (*Value*) yang dimiliki seseorang adalah “motif reaktif” yang menentukan “jawaban” seseorang dalam jangka pendek dan terhadap situasi-situasi yang dihadapinya.

### **2.1.4.3 Komponen Kompetensi**

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keterampilan (*Skill*)
3. Sikap Perilaku (*Attitude*)

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*Skill*)

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang *programer computer*. Disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sikap perilaku karyawan.

3. Sikap Perilaku (*Attitude*)

Pola tingkah laku seseorang karyawan didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi *knowledge*, *skill* dan *attitude* cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk

melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

## **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK Nomor 1 (2015:2) adalah Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Bastian (2010:9) pengertian laporan keuangan adalah Hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

#### **2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

#### **2.1.5.3 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah

#### **2.1.5.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pokok terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL )
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Berikut dijelaskan secara rinci masing-masing laporan keuangan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial menurut berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan dan juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Unsur-unsur penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah :

- a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran

lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atas pengeluaran dari satu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus atau defisit LRA

Surplus atau defisit LRA merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja yang ada dalam LRA selama satu periode.

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA atau SIKPA).

SILPA atau SIKPA merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan.

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun dan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

- a. Saldo Anggaran Lebih;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa lebih atau kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca meliputi :

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah dari peristiwa atau kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan. Aset tersebut diklasifikasi kedalam aset lancar dan aset tidak lancar.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

c. Ekuitas

Ekuitas dihasilkan dari selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan yang merupakan kekayaan bersih pemerintah.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO dan beban operasional, surplus atau defisit non-operasional, pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO.

a. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban

c. Surplus atau defisit kegiatan operasional merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

- d. Kegiatan operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.
- e. Surplus atau defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus atau defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.
- f. Pos luar biasa merupakan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau operasi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- g. Surplus atau defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dan setelah diperhitungkan dengan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional serta pos luar biasa.

#### 4. Pelaporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

- a. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

- b. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan, baik dalam jumlah maupun komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan seperti penerimaan atau pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
  - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penjelasan atau daftar terinci atas ilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan ekjadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan StandarAkuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Suwardjono (2012:101), menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada

gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan social negara. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

#### **2.1.5.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015 No. 1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat diperbandingkan

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan,

berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk lamaran eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi karakteristik materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian

yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak mempunyai kualitas andal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan yang tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Informasi termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### **2.1.5.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut Setyowati dkk. (2016) yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Peran Internal

Menurut Latjandu dkk. (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Komitmen Organisasi
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut I Made Edy Sutawan dkk (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Stress Kerja
2. Motivasi
3. Sistem Pengendalian Internal

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal, peran internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Stress Kerja, Motivasi serta Sistem Pengendalian Internal.

#### **2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2010).	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.	Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2.	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikr ama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

	(2014).	terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat.	Daerah.
3.	Emilda Ihsanti (2014).	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel. terikat.	Penerapan standar akuntansi keuangan daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Suci	Pengaruh	Pengaruh	Hasil penelitian

	Rahmadani (2015).	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman	menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
--	----------------------	--	---	---

		Barat).	Barat).	
5.	Sihite dan Holiawati (2017).	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6.	Ni Putu Lia Mahayani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2017).	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variable bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai	Terdapat pengaruh antara Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

		Laporan Keuangan.	variabel terikat.	
7.	Oka Reza Aditya (2017).	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Lapoaran Keuangan.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel bebas dan Kualitas Lapoaran Keuangan sebagai variabel terikat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
8.	Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Pontoh (2017).	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai variabel terikat.	Hasil Penelitianna bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9.	Putra Mhd Nazrin	Pengaruh Kompetensi Staf	Pengaruh Kompetensi Staf	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

	(2017).	Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat.	kompetensi staf akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10.	Arizal Kamal Pasha (2018).	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan	Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf

		Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kompetensi Staf Akuntansi sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat.	Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11.	Heni Sundari, Sri Rahayu (2018).	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel bebas dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai	Terdapat Pengaruh signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

		Daerah.	variable terikat.	
12.	Dimas Rusvianto, Sri Mulyani dan Indri Yuliafitri (2018).	Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel bebas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
13.	Dariana (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan mengenai kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

		Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Kompetensi Staf Akuntansi sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.	pemerintah daerah.
--	--	--	--	--------------------

14.	Gita Desipradani dan Fitri Nuraini (2018)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
-----	---	---	--	---

Sumber : Data Diolah, 2019.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60), Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa hubungan ataupun perbandingan.

### **2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Standar akuntansi pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu ; “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010:137) yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.”

Selain itu menurut Nordiawan dkk. (2009:25) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu: “SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah”.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas dapat penulis artikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan penelitian Sihite dan Holiawati (2017), mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Tangerang selatan. Hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2010), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena bertujuan untuk mencatat suatu tujuan pemerintah daerah. Dengan cara meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan prinsip *good governance* untuk mengelola keuangan daerah.

Sedangkan menurut penelitian Pasha (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014), penerapan standar akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena pada penerapannya, hasil laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tidak mempunyai perbedaan yang cukup berarti dengan standar akuntansi pada umumnya. Selain itu hampir semua standar akuntansi baik itu SAK dan IFRS diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### **2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem Pengendalian Internal menurut COSO dalam *Internal Control Integrated Framework* (2013:3) adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk providen keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Budiawan dan Purnomo, 2014).

Berdasarkan Penelitian Mahayani dkk. (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusvianto., dkk (2018), bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga menurut Aditya (2017), sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta., Dkk (2017), sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian tersebut sistem pengendalian internal apabila sudah diterapkan dengan baik, namun belum

dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

### **2.2.3. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dari setiap organisasi atau perusahaan, karena pegawai sangat menentukan berhasil atau tidaknya organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu perusahaan selalu berupaya untuk memperoleh pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dapat dikerjakan dengan baik (Hersona dkk, 2012).

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dkk, 2014).

Berdasarkan penelitian Nazrin (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia khususnya tenaga akuntan yang mengerti tata cara pelaporan keuangan, akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, menurut penelitian Dariana (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan mengenai kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan apabila staf mempunyai kompetensi yang baik, maka diharapkan dapat membuat dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan Desipradani (2018), juga membuktikan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015), menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengalaman di bidang keuangan.

#### **2.2.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Selain sumber daya manusia, hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Budiawan dan Purnomo, 2014).

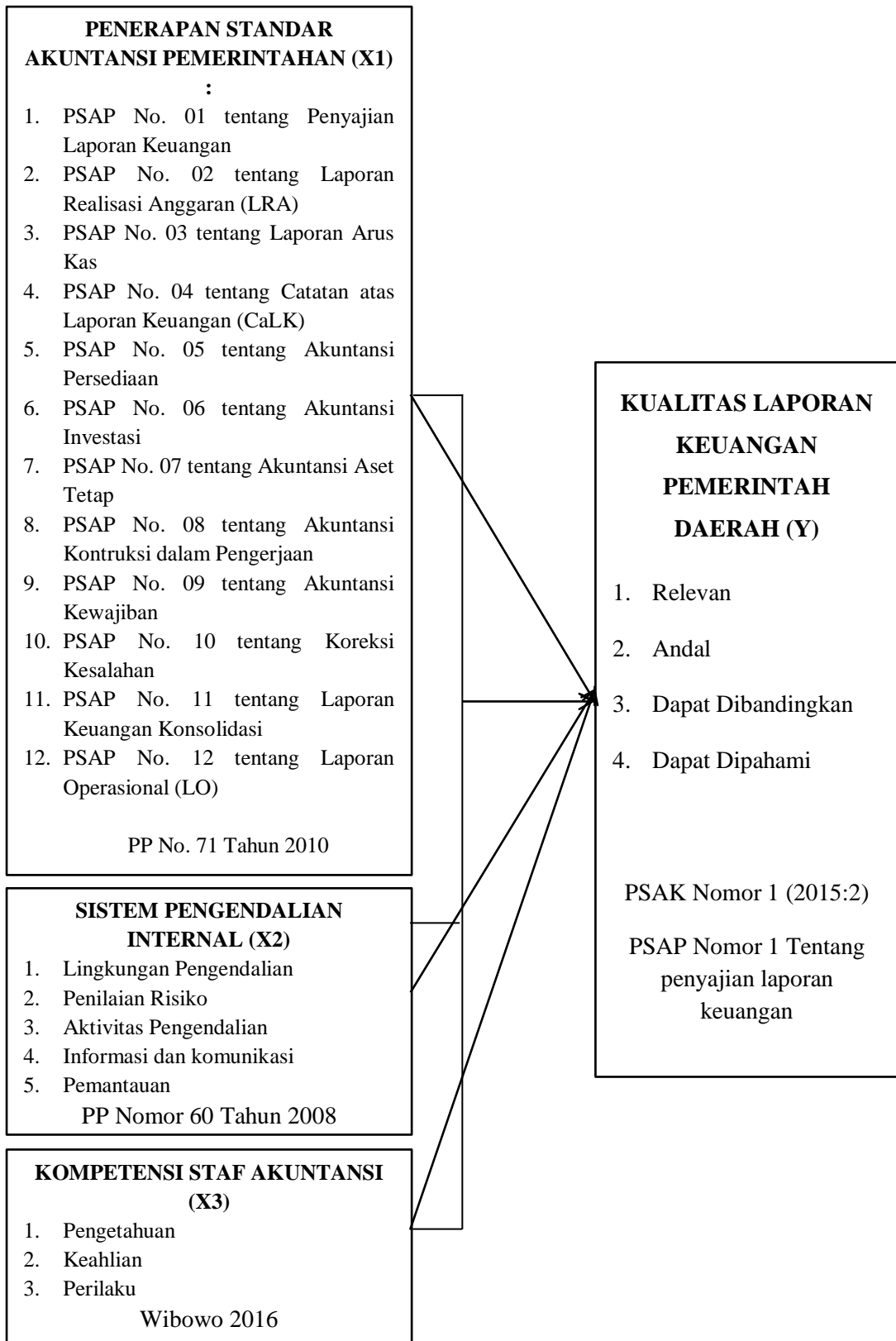
Pengendalian pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki kompetensi yang baik agar dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Terdapat karakteristik yang membentuk kompetensi, yaitu :

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Motif
4. Karakteristik Pribadi
5. Konsep Diri

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dkk, 2014).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihite dan Holiawati (2017), membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Selain itu menurut Udiyanti., dkk (2014), hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan menurut penelitian Pasha (2018), penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014), penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena pada penerapannya, hasil laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tidak mempunyai perbedaan yang cukup berarti dengan standar akuntansi pada umumnya. Selain itu hampir semua standar akuntansi baik itu SAK dan IFRS diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), memerlukan Sistem Pengendalian Internal yang baik karena mampu mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Serta dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas maka diperlukan juga tenaga akuntan yang berkompeten untuk membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63), mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- H<sub>3</sub> : Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- H<sub>4</sub> : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Instansi**

##### **3.1.1 Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:2) objek penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam suatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Selain itu, objek penelitian juga merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian dan menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Kompetensi Staf Akuntansi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Pada SKPD Kota Bandung.

##### **3.1.2 Gambaran Umum Instansi**

###### **3.1.2.1 Sejarah Singkat Kota Bandung**

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 km ke arah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung di pimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusuma II (17934-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum I”, kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groot Postweg) dari anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jendral Sudirman–Jalan Asia Afrika–Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta bupati Bandung dan bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawandak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan,

terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada Lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan Kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

### **3.1.2.2 Visi dan Misi**

#### **1. Visi Pemerintah Kota Bandung**

Visi Pemerintah Kota Bandung yaitu, “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”.

#### **2. Misi Pemerintah Kota Bandung**

Misi Pemerintah Kota Bandung, yaitu :

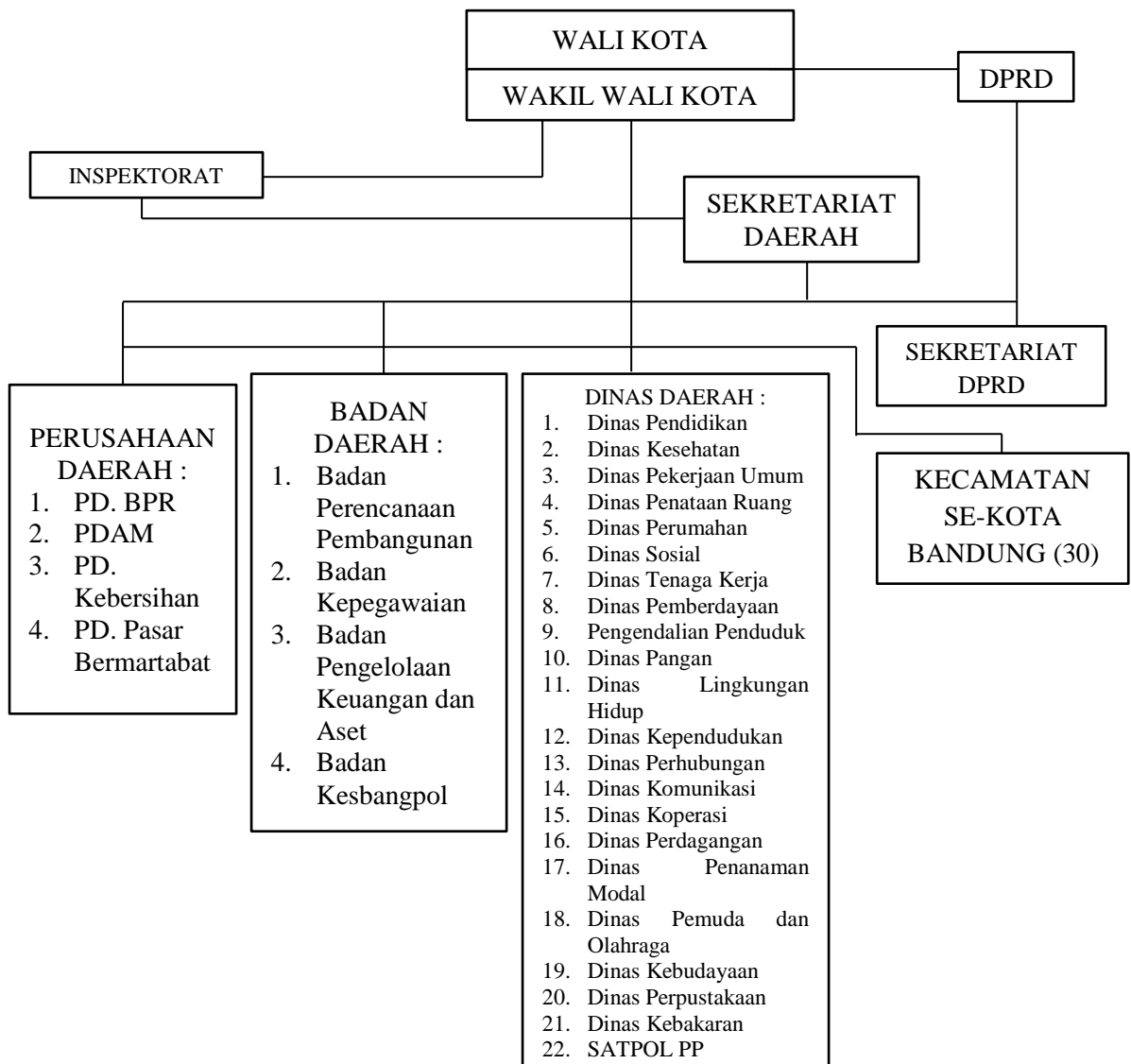
- a. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Di maksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Di maksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).
- c. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Di maksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya.
- d. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Di maksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

### 3.1.2.3 Struktur Organisasi



**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi SKPD Kota Bandung**

**Sumber : SKPD Kota Bandung**

## **3.2 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian merupakan suatu cara dalam pengumpulan data penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

### **3.2.1 Metode yang digunakan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2017:7), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel-variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penerapan analisis deskriptif berkaitan dengan semua variabel yang penulis teliti yaitu pada standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi serta kualitas laporan keuangan. Untuk keempat variabel tersebut penulis akan memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungannya dengan fenomena yang penulis ambil dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga, adanya penerapan analisis verifikatif yang berkaitan dengan semua variabel yang penulis teliti yaitu pada standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi serta kualitas laporan keuangan. Dimana, dengan cara ini penulis akan menjelaskan hubungan kualitas (sebab-akibat) antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis juga perhitungan statistik seperti hubungan atas pengaruh dari standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2017:147) Tujuan dari penelitian deskriptif dan verifikatif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut dan melihat pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah suatu atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan yang lain. Pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi.

## 2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari variabel tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan berdasarkan teori yang ada. Adapun penjabaran indikator tersebut dapat dilihat dari tabel operasionalisasi variabel penelitian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
<b>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)</b>	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	1. PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan	Ordinal
		2. PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
		3. PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas	
		4. PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	
		5. PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan	
		6. PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi	
		7. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap	
		8. PSAP No. 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan	
		9. PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban	
		10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan	
		11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi	
		12. PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional	

<b>Sistem Pengendalian Internal (X2)</b>	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Lingkungan Pengendalian	Ordinal
		2. Penilaian Risiko	
		3. Aktivitas Pengendalian	
		4. Informasi dan Komunikasi	
		5. Pemantauan	
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008		
<b>Kompetensi Staf Akuntansi</b>	kompetensi adalah suatu kemampuan	1. Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> )	

(X3)	<p>untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dirinci oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Orang yang kompeten berarti orang yang memiliki kualitas hasil pekerjaan yang baik.</p> <p>Wibowo (2016:271)</p>	<p>2. Keahlian (<i>Skill</i>)</p> <hr/> <p>3. Perilaku (<i>Attitude</i>)</p>	Ordinal
<b>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota</b>	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu	<p>1. Relevan</p> <hr/> <p>2. Andal</p> <hr/> <p>3. Dapat Dibandingkan</p> <hr/> <p>4. Dapat Dipahami</p>	

<b>Bandung (Y)</b>	<p>hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan.</p> <p>PSAK Nomor 1 (2015:2)</p>		Ordinal
--------------------	---	--	---------

Sumber : Data Diolah, 2019.

### 3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

#### 3.2.3.1 Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini, tidak terlepas dari sumber data yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang populasi dalam penelitian ini adalah 66 SKPD Kota Bandung.

**Tabel 3.2****Daftar SKPD Kota Bandung**

<b>No</b>	<b>Nama SKPD Kota Bandung</b>
1.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Kesehatan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
14.	Dinas Pangan dan Pertanian
15.	Dinas Penataan Ruang
16.	Dinas Pekerjaan Umum
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Pendidikan
21.	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23.	Dinas Perhubungan
24.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
25.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan, dan Pertamanan
26.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
27.	Dinas Tenaga Kerja
28.	Inspektorat Daerah
29.	Kecamatan Andir
30.	Kecamatan Antapani
31.	Kecamatan Arcamanik
32.	Kecamatan Astana Anyar
33.	Kecamatan Babakan Ciparay
34.	Kecamatan Bandung Kidul
35.	Kecamatan Bandung Kulon
36.	Kecamatan Bandung Wetan
37.	Kecamatan Batununggal
38.	Kecamatan Bojongloa Kaler
39.	Kecamatan Bojongloa Kidul
40.	Kecamatan Buahbatu
41.	Kecamatan Cibeunying Kaler

42.	Kecamatan Cibeunying Kidul
43.	Kecamatan Cibiru
44.	Kecamatan Cicendo
45.	Kecamatan Cidadap
46.	Kecamatan Cinambo
47.	Kecamatan Coblong
48.	Kecamatan Gedebage
49.	Kecamatan Kiaracondong
50.	Kecamatan Lengkong
51.	Kecamatan Mandalajati
52.	Kecamatan Panyileukan
53.	Kecamatan Rancasari
54.	Kecamatan Regol
55.	Kecamatan Sukajadi
56.	Kecamatan Sukasari
57.	Kecamatan Sumur Bandung
58.	Kecamatan Ujung Berung
59.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
60.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
61.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut
62.	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
63.	Rumah Sakit Umum Daerah
64.	Satuan Polisi Pamong Praja
65.	Sekretariat Daerah
66.	Sekretariat DPRD

**Sumber : Data Diolah, 2019.**

### **3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).

Menurut Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Menurut Sugiyono (2017:82) terdapat dua teknik *sampling* yang dapat digunakan, yaitu :

1. *Probability Sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster)*.
2. *Non Probability Sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi ; *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*.

Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Sedangkan cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017:82). Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan maka digunakan rumus slovin berikut ini :

$$n = \frac{N}{1 + N_e^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Perkiraan tingkat Kesalahan (5%)

Ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{66}{1 + 66(0.05)^2}$$

n = 56,65 Dibulatkan menjadi 57 SKPD

Presisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, sehingga sampel yang didapat adalah 57 SKPD, untuk responden yang dipilih oleh peneliti adalah pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi atau keuangan karena bagian akuntansi atau keuangan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 3.3**

**Sampel SKPD Kota Bandung**

No	Nama SKPD Kota Bandung
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan, dan Pertamanan
2.	Kecamatan Arcamanik
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Kecamatan Bojongloa Kidul
5.	Satuan Polisi pamong praja
6.	Dinas Tenaga Kerja
7.	Kecamatan Rancasari
8.	Kecamatan Ujungberung
9.	Rumah Sakit Umum Daerah
10.	Kecamatan Cinambo
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga
12.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
13.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
14.	Kecamatan Sukasari
15.	Sekretariat DPRD
16.	Kecamatan Antapani
17.	Kecamatan Panyileukan
18.	Dinas Pangan dan Pertanian
19.	Kecamatan Buahbatu
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

21.	Kecamatan Astanaanyar
22.	Kecamatan Bandung Kidul
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25.	Inspektorat Daerah
26.	Kecamatan Andir
27.	Kecamatan Bandung Wetan
28.	Dinas Komunikasi dan Informatika
29.	Kecamatan Cicendo
30.	Kecamatan Batununggal
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
32.	Dinas Pekerjaan Umum
33.	Dinas Penata Ruang
34.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
35.	Dinas Perhubungan
36.	Kecamatan Mandalajati
37.	Kecamatan Bandung Kulon
38.	Dinas Kesehatan
39.	Kecamatan Cibeunying Kaler
40.	Kecamatan Cibiru
41.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
42.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
43.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
44.	Kecamatan Coblong
45.	Kecamatan Kiaracondong
46.	Kecamatan Gedebage
47.	Kecamatan Sukajadi
48.	Kecamatan Sumur Bandung
49.	Kecamatan Regol
50.	Dinas Pendidikan
51.	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
52.	Kecamatan Lengkong
53.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
54.	Sekretariat Daerah
55.	Kecamatan Cidadap
56.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
57.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Sumber : Data Diolah 2019**

### **3.2.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.2.4.1 Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Menurut Sugiyono (2017:137) sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai *literature* seperti penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sekaran (2017:137) teknik pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian. Terdapat beberapa metode pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuisisioner.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

##### **1. Kuesioner**

Menurut Sekaran (2017:142) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini juga merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan yang bisa diharapkan dari responden.

Menurut Sugiyono (2017:93) Skala *likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk pernyataan yang mengukur nilai positif, jawaban tersebut diberi angka sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Penilaian Skala *Likert***

<b>Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

**Sumber : Sugiyono (2017:93)**

Setiap variabel penelitian, harus menetapkan peringkat dengan membandingkan skor aktual dan ideal. Skor aktual tersebut diperoleh dari hasil perhitungan seluruh pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pernyataan kuesioner kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Apabila digambarkan dengan rumus adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Skor Aktual = Jumlah skor jawaban responden

Skor Ideal = Jumlah skor maksimum (jumlah responden  $\times$  5)

Presentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang presentase skor maksimum ( $5/5 = 100$ ) dan skor minimum ( $1/5 = 20\%$ ). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada :

**Tabel 3.5**

**Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden**

No	Presentase Skor	Kategori Skor
1	20,00 – 36,00	Tidak Baik
2	36,01 – 52,00	Kurang Baik
3	52,01 – 68,00	Cukup
4	68,01 – 84,00	Baik
5	84,01 – 100	Sangat Baik

**Sumber : Narimawati (2008:85)**

**2. Wawancara**

Menurut Sekaran (2017:137), wawancara adalah metode pengumpulan data yang efektif, terutama selama tahap penelitian eksploratif. Peneliti berusaha untuk memperoleh data melalui wawancara dengan cara memberikan pertanyaan mengenai topik yang berkaitan dengan hal yang ingin dicari.

**3. Penelitian Kepustakaan**

Penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi untuk dijadikan sebagai landasan teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur-literatur berupa buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3.2.5 Metode Pengujian Data**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa pengujian, antara lain uji validitas dan uji reabilitas. Menurut Sugiyono (2017:125) perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan realibel dengan instrument yang valid dan realibel. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan hasil penelitian yang realibel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.

#### **3.2.5.1 Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2017:267) validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Karena pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.

Uji validitas juga dijelaskan oleh Ghozali (2018:52), digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Metode korelasi yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi *Pearson Product Moment*.

Adapun rumus *product moment* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi

$X_i$  = Jumlah Skor keseluruhan untuk setiap item pertanyaan variabel X

$Y_i$  = Jumlah skor keseluruhan untuk setiap item pertanyaan variabel Y

n = Banyak responden

Pengujian ini dilakukan dengan program SPSS Versi 25.0 dan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- a). Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah.
- b). Jika koefisien korelasi (r) bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

### 3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang tersebut terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, yaitu dengan bantuan program *Statistic Program Social Science (SPSS) Versi 25.0 for windows*. Adapun rumus statistik yang digunakan, yaitu:

$$r = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum Si^2}{Si^2} \right)$$

Keterangan :

r = Koefisien reliabilitas

k = Banyaknya jumlah item

$\sum Si^2$  = Jumlah varian sector item

$Si^2$  = Varian total skor

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan SPSS versi 25.0 dan menggunakan metode *Cronbach Alpha* yang akan menghasilkan nilai *alpha*, suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha* > 0.70. (Ghozali, 2018:48).

### 3.2.6 *Interval successive method*

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner berskala ordinal, sedangkan untuk melanjutkan analisis dibutuhkan skala interval, maka dari itu dilakukan pengukuran skala lanjutan sehingga didapat data berskala interval. Untuk itu digunakan *Method Successive Interval (MSI)* dengan langkah-langkah sebagai berikut (Ridwan dan Kuncoro, 2014:30) :

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban responden pada setiap pertanyaan atau pernyataan.

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan atau pernyataan, dilakukan perhitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
3. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pertanyaan atau pernyataan dan setiap pilihan jawaban.
4. Menentukan nilai densitas.
5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$SCALE\ VALUE = \frac{(Density\ at\ lower\ limit) - (Density\ at\ upper\ limit)}{(Area\ under\ upper\ limit) - (Area\ under\ lower\ limit)}$$

Keterangan :

*Density at lower limit* = Kepadatan batas bawah

*Density at upper limit* = Kepadatan batas atas

*Area under upper limit* = Daerah di batas atas

*Area under lower limit* = Daerah di batas bawah

Menentukan nilai transformasi Y =  $SV + (1 + |SV_{min}|)$

### 3.2.7 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis Data

#### 3.2.7.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

### 3.2.7.2 Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas :
  - 1) Jika Asymp. Sig > 0,05 atau > 5% maka data normal
  - 2) Jika Asymp. Sig < 0,05 atau < 5% maka data tidak norm

## 2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018:107), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortognonal. Variabel ortognonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di model regresi adalah dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawanya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai  $Tolerance \leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Jika nilai  $Tolerance > 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$  maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas. Model regresi yang baik yaitu tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel bebas lainnya. Pengujian multikolonieritas menggunakan bantuan SPSS v.25.0.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar analisisnya, apabila titik-titik yang membentuk

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan pengujian menggunakan SPSS v.25.0.

### 3.2.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara perubah respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen). Regresi linier berganda hampir sama dengan regresi linier sederhana, hanya saja pada regresi linier berganda variabel bebas lebih dari satu variabel penduga. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atau X. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017).

Penulis menggunakan analisis ini karena variabel independen lebih dari satu. Adapun persamaan regresi linier berganda, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b = *Intercept*

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, dan b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

$X_2$	= Sistem Pengendalian Internal
$X_3$	= Kompetensi Staf Akuntansi
$e$	= <i>Error</i> /pengaruh faktor lain

### 3.2.7.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan.

#### 1. Uji Signifikan t (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dalam penelitian ini peneliti menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%. Untuk dapat mengetahui berpengaruh atau tidak, maka  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ . Untuk mengetahui sebagai batas daerah penerimaan dua penolakan maka *degree of freedom* (d.f) dalam penelitian dihitung dengan  $(d.f) = nk$ , kemudian untuk menghitung  $t_{hitung}$ .

Menurut Sugiyono (2017:184), dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \text{ atau } t_{hitung} = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$$

Keterangan :

$t_{hitung}$  = nilai t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel

n = jumlah sampel atau data pengamatan

r = nilai koefisien korelasi parsial yang ditemukan

Hasil  $t_{hitung}$  dapat dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $p \text{ value} > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $p \text{ value} < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima.

Uji t dalam penelitian ini untuk membuktikan Pengaruh Signifikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai berikut :

a). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

$H_0$  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_1$  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b). Sistem Pengendalian Internal

$H_0$  : Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_1$  : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c). Kompetensi Staf Akuntansi

$H_0$  : Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_1$  : Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 2. Uji Signifikan F (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:96), uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen (X1, X2 dan X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Penelitian ini menguji seberapa besar pengaruh pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%. Menghitung nilai  $F_{hitung}$  dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau tidak. Dapat digunakan rumus signifikan Uji F sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R : Koefisien korelasi ganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

dk : (n-k-1) derajat kebebasan

Hasil  $F_{hitung}$  dapat dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p \text{ value} > 0,05$ , maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau  $H_0$  diterima.
- 2) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $p \text{ value} < 0,05$ , maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau  $H_0$  ditolak.

Uji F ini untuk membuktikan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan, yaitu:

$H_0$  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_1$  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3.2.7.5 Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel

independen yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> yang mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:95). Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan program SPSS 25.0 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Nilai korelasi dapat bervariasi dari -1 melalui 0 hingga 1

1. Bila  $r = 0$  atau  $r$  mendekati 0, berarti antara kedua variabel tidak terdapat hubungan antara kedua variabel sangat rendah.
2. Bila  $r = +1$  berarti bahwa kedua variabel mempunyai hubungan positif dan sempurna (mendekati 1 maka hubungan sangat kuat dan positif).
3. Bila  $r = -1$  berarti kedua variabel mempunyai hubungan negatif dan sempurna (mendekati -1 maka hubungan sangat kuat dan negatif).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil penelitian ini adalah gambaran atau uraian dan analisis data-data mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung yang diperoleh dari data primer dengan dilakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran dilakukan kepada 57 responden pada SKPD di Kota Bandung dengan responden pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi yang diperoleh dengan 57 responden yang terdiri dari 36 item pernyataan kuesioner.

##### 4.1.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan di SKPD Kota Bandung. Dari data yang terkumpul diperoleh deskripsi responden yang dibagi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja di SKPD terkait. Adapun gambaran umum responden yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

#### **Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
20-30	1	1,75 %
31-40	17	29,82 %
41-50	24	42,11%
51-60	15	26,32%
Total	57	100%

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa frekuensi responden didominasi oleh usia 41-50 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 42,11% sedangkan sisanya pada usia 20-30 tahun sebanyak 1 responden atau sebesar 1,75%, 31-40 tahun sebanyak 17 responden atau sebesar 29,82%, dan usia 51-60 tahun sebanyak 14 responden atau sebesar 26,32%.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pria	46	80,7%
Wanita	11	19,3%
Total	57	100%

**Sumber : Data Diolah 2019**

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin pria sebanyak 46 responden atau sebesar 80,7% sedangkan sisanya adalah berjenis kelamin wanita sebanyak 11 responden atau sebanyak 19,3%.

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
SMA/Sederajat	27	47,37%
D3	3	5,26%
S1	21	36,84%
S2	6	10,53%
S3	0	0%
Total	57	100%

**Sumber : Data Diolah 2019**

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa frekuensi responden didominasi oleh pendidikan SMA/Sederajat dengan jumlah 27 responden atau sebanyak 47,37%, sisanya sebanyak 3 responden atau sebanyak 5,26% berpendidikan Diploma (D3), sebanyak 21 responden atau sebanyak 36,84% berpendidikan Strata 1 (S1), dan sebanyak 6 responden atau sebanyak 10,53% berpendidikan Strata 2 (S2).

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

<b>Lama Bekerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
1-5 Tahun	7	12,28 %
6-10 Tahun	10	17,54 %
11-15 Tahun	14	24,57 %
16-20 Tahun	15	26,32 %
≥ 20 Tahun	11	19,29 %
Total	57	100 %

**Sumber : Data Diolah 2019**

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lama bekerja 16-20 tahun yaitu sebanyak 15 responden atau sebesar 26,32%, sedangkan sisanya lama bekerja 1-5 tahun yaitu sebanyak 7 responden atau sebesar 12,28%, lama bekerja 6-10 tahun yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 17,54%. Lama bekerja 11-15 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 24,57%, dan lama bekerja ≥ 20 tahun yaitu sebanyak 11 responden atau sebesar 19,29%.

#### **4.1.2 Hasil Uji Validitas**

Menurut Ghazali (2018:52) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas akan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Product Moment Pearson*. Pengujian tersebut dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap item pernyataan kuesioner. Dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini jumlah sampel (Ghozali, 2018:52). Dalam penelitian ini jumlah

sampel  $n=57$ , sehingga besarnya  $df$  yaitu  $57-2 = 55$ , dengan signifikansinya 5% didapat  $r_{tabel} = 0,2609$ . Jika koefisien korelasi ( $r$ ) bernilai positif dan lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah. Sebaliknya jika bernilai negatif atau positif namun lebih kecil dari  $r_{tabel}$ , maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid.

Untuk hasil uji validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

<b>No. Item</b>	<b><i>Pearson Correlation</i></b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kriteria</b>
X11	0,474	0,2609	Valid
X12	0,525	0,2609	Valid
X13	0,565	0,2609	Valid
X14	0,515	0,2609	Valid
X15	0,600	0,2609	Valid
X16	0,541	0,2609	Valid
X17	0,440	0,2609	Valid
X18	0,487	0,2609	Valid
X19	0,324	0,2609	Valid
X110	0,454	0,2609	Valid
X111	0,530	0,2609	Valid
X112	0,390	0,2609	Valid

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan yang membentuk penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga seluruh pernyataan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan dinyatakan valid.

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal**

<b>No. Item</b>	<b><i>Pearson Correlation</i></b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kriteria</b>
X21	0,331	0,2609	Valid
X22	0,462	0,2609	Valid
X23	0,487	0,2609	Valid
X24	0,681	0,2609	Valid
X25	0,516	0,2609	Valid
X26	0,552	0,2609	Valid
X27	0,535	0,2609	Valid
X28	0,463	0,2609	Valid
X29	0,443	0,2609	Valid
X210	0,451	0,2609	Valid

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan yang membentuk variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga seluruh pernyataan mengenai sistem pengendalian internal dinyatakan valid.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Validitas Kompetensi Staf Akuntansi**

<b>No. Item</b>	<b><i>Pearson Correlation</i></b>	<b>r Tabel</b>	<b>Kriteria</b>
X31	0,563	0,2609	Valid
X32	0,637	0,2609	Valid
X33	0,796	0,2609	Valid
X34	0,757	0,2609	Valid
X35	0,773	0,2609	Valid
X36	0,710	0,2609	Valid

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan yang membentuk variabel kompetensi staf akuntansi memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga seluruh pernyataan mengenai kompetensi staf akuntansi dinyatakan valid.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

No. Item	<i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Kriteria
Y11	0,614	0,2609	Valid
Y12	0,512	0,2609	Valid
Y13	0,655	0,2609	Valid
Y14	0,642	0,2609	Valid
Y15	0,587	0,2609	Valid
Y16	0,586	0,2609	Valid
Y17	0,700	0,2609	Valid
Y18	0,780	0,2609	Valid

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan yang membentuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga seluruh pernyataan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid.

#### **4.1.3 Uji Reliabilitas**

Menurut Ghozali (2018:45) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang tersebut terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, yaitu dengan bantuan program *Statistic Program Social Science (SPSS) Versi 25.0 for windows*.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan SPSS versi 25.0 dan menggunakan metode *Cronbach Alpha* yang akan menghasilkan nilai *alpha*, suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha*  $> 0.70$ . (Ghozali,

2018:48). Untuk hasil uji reliabilitas masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**a. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)**

Hasil pengujian reliabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Uji Reliabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.708	.708	12

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Setiap pernyataan untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dapat dinyatakan reliabel karena hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,708 dengan artian bahwa hasil tersebut dapat dikatakan reliabel karena memenuhi syarat 0,60 – 0,70 (reliabel).

**b. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X2 (Sistem Pengendalian Internal)**

Hasil pengujian reliabilitas Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items

.657	.653	10
------	------	----

Sumber : Data Diolah, 2019

Setiap pernyataan untuk variabel sistem pengendalian internal (X2) dapat dinyatakan reliabel karena hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,657 dengan artian bahwa hasil tersebut dapat dikatakan reliabel karena memenuhi syarat 0,60 – 0,70 (reliabel).

**c. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X3 (Kompetensi Staf Akuntansi)**

Hasil pengujian reliabilitas Kompetensi Staf Akuntansi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**

**Uji Reliabilitas Kompetensi Staf Akuntansi**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.799	.799	6

Sumber : Data Diolah, 2019

Setiap pernyataan untuk variabel kompetensi staf akuntansi (X3) dapat dinyatakan reliabel karena hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,799 dengan artian bahwa hasil tersebut dapat dikatakan reliabel karena memenuhi syarat 0,60 – 0,70 (reliabel) atau lebih besar dari nilai *Cronbach's Alpha* yang disyaratkan 0,70.

**d. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)**

Hasil pengujian reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.789	.788	8

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Setiap pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat dinyatakan reliabel karena hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,789 dengan artian bahwa hasil tersebut dapat dikatakan reliabel karena memenuhi syarat 0,60 – 0,70 (reliabel) atau lebih besar dari nilai *Cronbach's Alpha* yang disyaratkan 0,70

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Gambaran Variabel Penelitian**

Gambaran dari tanggapan responden dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan lebih mudah mengintreprestasikan variabel yang sedang diteliti, dengan melakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden.

#### 4.2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD Kota

##### Bandung

Jawaban mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan pada SKPD kota bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.13**

#### **Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
		5	4	3	2	1			
1	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi atau peristiwa yang terjadi.	43	12	2	0	0	269	285	94,38
2	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu menyusun dan menyajikan LRA menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.	30	25	2	0	0	256	285	89,82
3	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu menyusun dan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	40	16	1	0	0	267	285	93,68

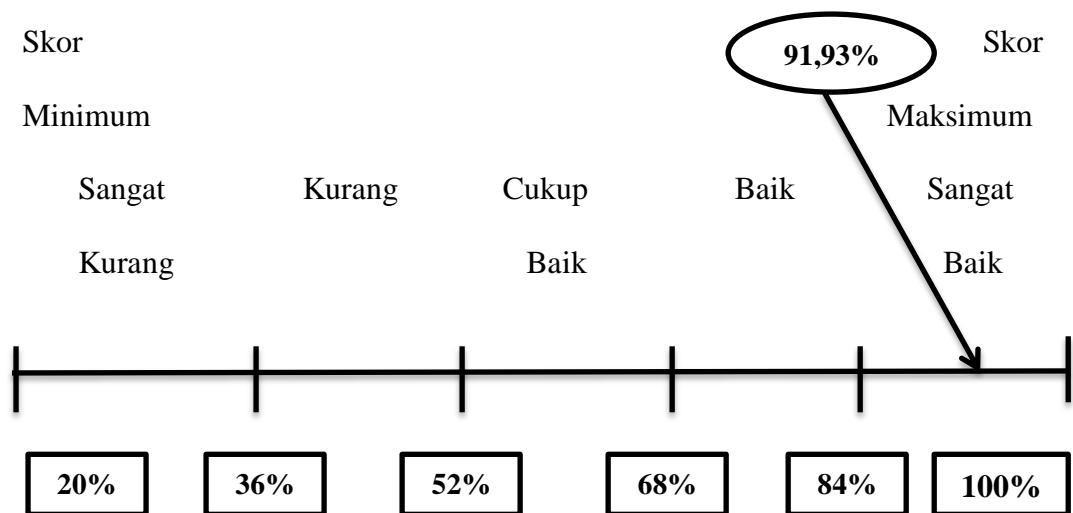
	(SAP) dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.								
4	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan atas pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.	36	19	2	0	0	262	285	91,93
5	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.	37	20	0	0	0	265	285	92,98
6	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan dinilai perolehan investasi dapat diukur.	34	23	0	0	0	262	285	91,93
7	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mencatat atau menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan	30	27	0	0	0	246	285	86,31

	mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.								
8	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.	37	20	0	0	0	265	285	92,98
9	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul.	36	20	1	0	0	263	285	92,28
10	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mengkoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.	33	24	0	0	0	261	285	91,58
11	Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas	37	19	0	1	0	263	285	92,28

	akuntansi.								
12	Pada instansi tempat saya bekerja, telah dibuat laporan operasional yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.	37	20	0	0	0	265	285	92,98
<b>Total Skor</b>							<b>3144</b>	<b>3420</b>	<b>91,93</b>

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 3144 dan skor idealnya sebesar 3420 dengan nilai presentase yang diperoleh 91,93%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berada pada kriteria sangat baik. Hasil perhitungan tersebut digambarkan pada garis kontinum pada halaman berikutnya.



Gambar 4.1

Garis Kontinum Kategori Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

#### 4.2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pada SKPD Kota Bandung

Jawaban mengenai sistem pengendalian internal pada SKPD kota bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.14**  
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Pengendalian Internal**

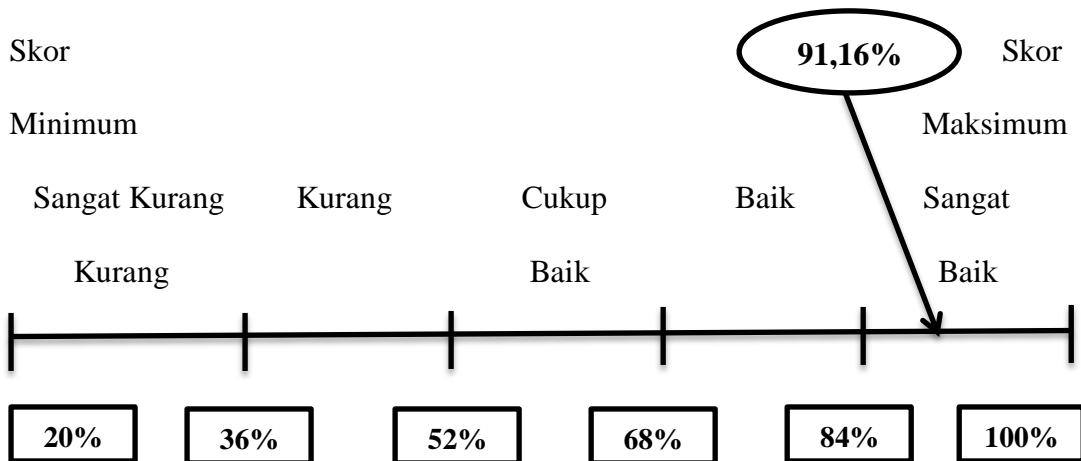
No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
		5	4	3	2	1			
1	Menerapkan aturan, perilaku dan etika.	47	8	2	0	0	273	285	95,79
2	Pada instansi tempat saya bekerja, memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.	37	18	2	0	0	263	285	92,28
3	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran atau risiko terhadap sistem akuntansi.	24	31	2	0	0	250	285	87,72
4	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko terhadap sistem dan prosedur akuntansi.	31	17	9	0	0	250	285	87,72
5	Prosedur pengamanan fisik	38	19	0	0	0	266	285	93,33

	aset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.								
6	Menetapkan pemisahan atas fungsi yang memadai sehingga tidak terjadi <i>double job</i> .	31	24	2	0	0	257	285	90,17
7	Terdapat berbagai bentuk sarana dan komunikasi guna untuk mendukung pengendalian internal.	34	23	0	0	0	262	285	91,93
8	Mengelola sarana komunikasi dan memperbaiki sistem informasi secara berkala.	34	20	3	0	0	259	285	90,88
9	Menyelenggarakan pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan rutin, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.	33	22	2	0	0	259	285	90,88
10	Mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.	31	26	0	0	0	259	285	90,88
<b>Total Skor</b>							2598	2850	91,16

Sumber : Data Diolah,2019

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel sistem

pengendalian internal sebesar 2598 dan skor idealnya sebesar 2850 dengan nilai presentase yang diperoleh 91,16%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berada pada kriteria sangat baik. Hasil perhitungan tersebut digambarkan pada garis kontinum.



**Gambar 4.2**

**Garis Kontinum Kategori Sistem Pengendalian internal**

**4.2.1.3 Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung**

Jawaban mengenai kompetensi staf akuntansi pada SKPD kota bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.15**

**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kompetensi Staf Akuntansi**

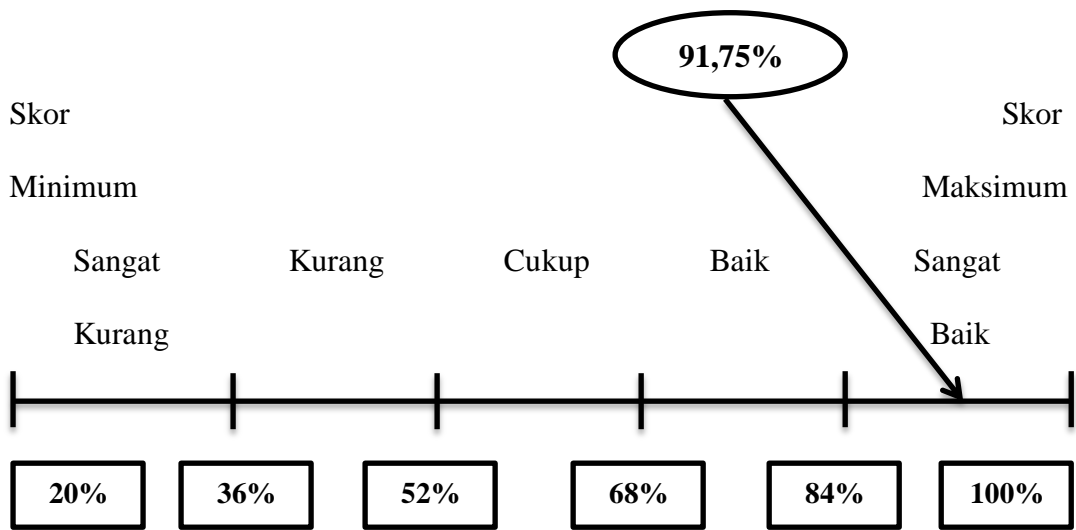
No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
		5	4	3	2	1			
1	Mampu memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan	41	15	1	0	0	268	285	94,03

	kinerja instansi pemerintah, serta siklus akuntansi dengan baik.								
2	Sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dengan tujuan untuk meng- <i>upgrade</i> pengetahuan di bidang akuntansi.	30	25	2	0	0	256	285	89,82
3	Mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	34	20	3	0	0	259	285	90,88
4	Mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.	34	20	3	0	0	259	285	90,88
5	Bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.	40	17	0	0	0	268	285	94,03
6	Menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.	31	26	0	0	0	259	285	90,88
<b>Total Skor</b>							1569	1710	91,75

**Sumber : Data Diolah,2019**

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel kompetensi staf akuntansi sebesar 1569 dan skor idealnya sebesar 1710 dengan nilai presentase yang diperoleh 91,75%. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi

berada pada kriteria sangat baik. Hasil perhitungan tersebut digambarkan pada garis kontinum.



**Gambar 4.3**  
**Garis Kontinum Kategori Kompetensi Staf Akuntansi**

**4.2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

Jawaban mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kota bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

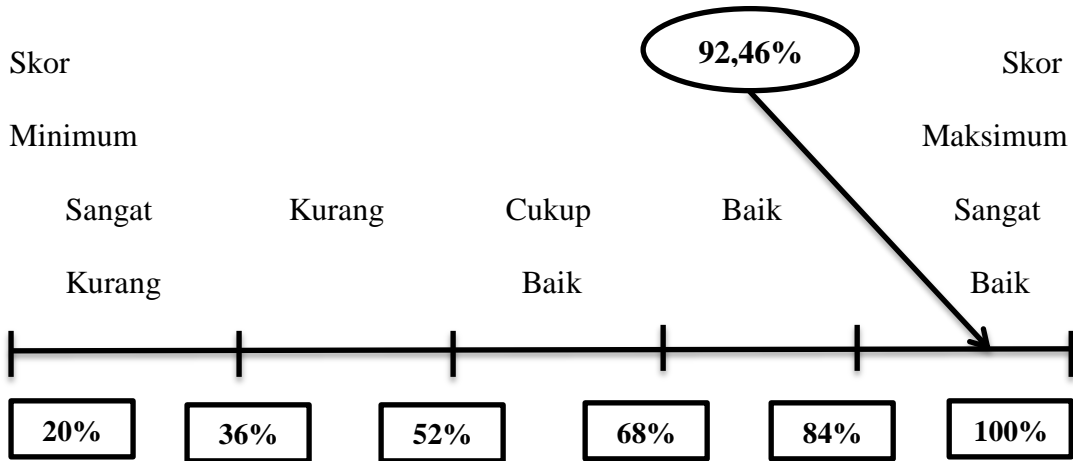
No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
		5	4	3	2	1			
1	Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.	41	16	0	0	0	269	285	94,38
2	Laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan pedoman untuk	35	22	0	0	0	263	285	92,28

	memprediksi kinerja keuangan.								
3	Informasi dalam laporan keuangan disajikan secara lengkap.	40	16	1	0	0	267	285	93,68
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan secara jujur atau sesuai dengan fakta yang ada.	36	19	1	0	0	259	285	90,88
5	Informasi yang disajikan digunakan sesuai dengan kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.	29	27	1	0	0	256	285	89,82
6	Informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya.	40	17	0	0	0	268	285	94,03
7	Informasi keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	39	17	1	0	0	266	285	93,33
8	Informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna.	33	23	1	0	0	260	285	91,23
<b>Total Skor</b>							2108	2280	92,46

**Sumber : Data Diolah,2019**

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 2108 dan skor idealnya sebesar 2280 dengan nilai presentase yang diperoleh 92,46%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah berada pada kriteria sangat baik. Hasil perhitungan tersebut digambarkan pada garis kontinum.



**Gambar 4.4**

**Garis Kontinum Kategori Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

**4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik**

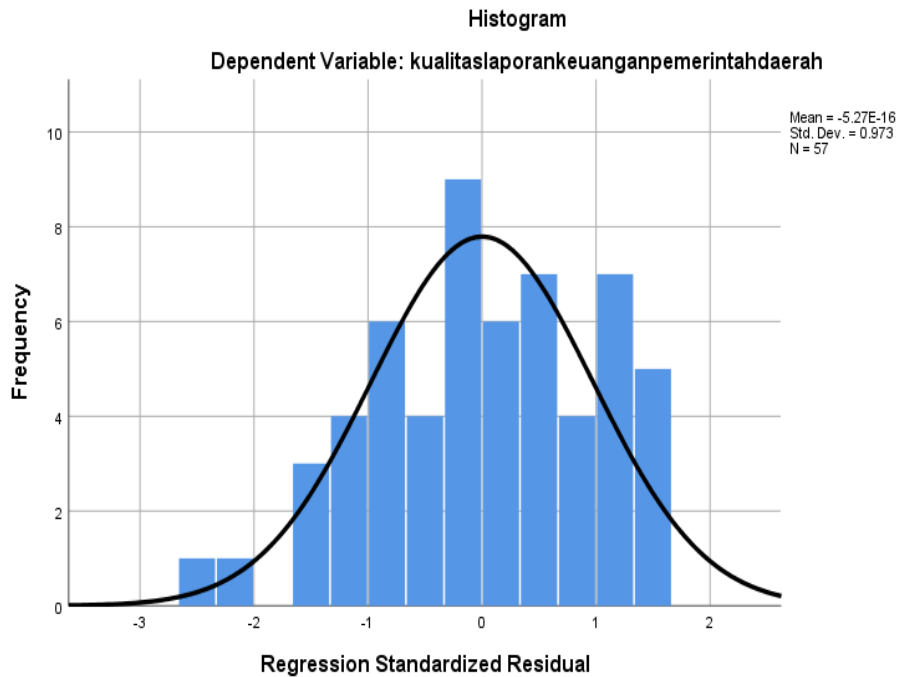
**1. Uji Normalitas Data**

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas :
  - 1) Jika Asymp. Sig > 0,05 atau > 5% maka data normal
  - 2) Jika Asymp. Sig < 0,05 atau < 5% maka data tidak norma

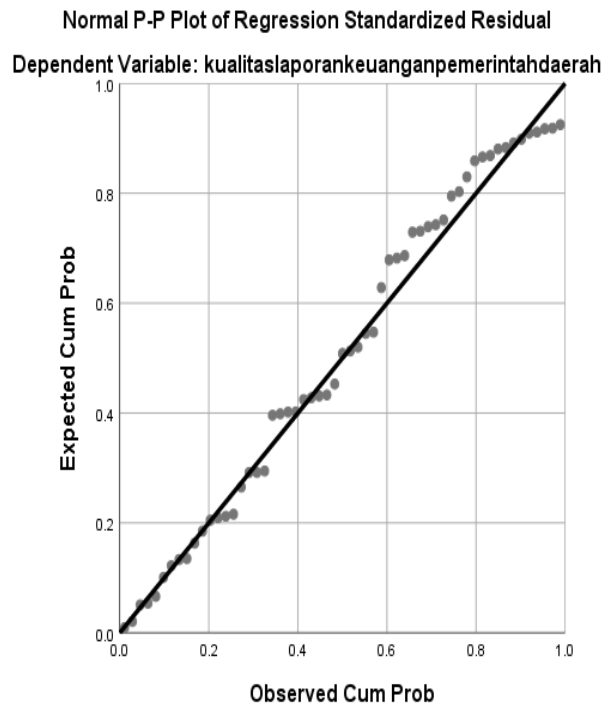
Untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun jika hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Yang lebih handal dengan melihat *normal probability plot*, salah satu cara melihat normalitas adalah dengan uji *kolmogorov smirnov* yang digunakan untuk uji statistik apakah datanya normal atau tidak. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik

histogram:



**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas Histogram**  
**Sumber : Data Diolah, 2019**

Gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Dalam hal ini data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot*:



**Gambar 4.6**

**Hasil Uji Normalitas Plot**

**Sumber : Data Diolah, 2019**

Gambar 4.2 di atas menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi uji normalitas.

Uji normalitas selanjutnya dilakukan dengan Uji kolmogorov smirnov satu arah dengan dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- 1) Jika Asymp. Sig > 0,05 atau > 5% maka data normal
- 2) Jika Asymp. Sig < 0,05 atau < 5% maka data tidak normal

**Tabel 4.17**

**Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	<i>Unstandardizes Residual</i>
N	57
<i>Std. Deviation</i>	2,69186900
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,200

**Sumber : Data Diolah,2019**

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah 2,691 dengan signifikan sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi normal.

## **2. Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghazali (2018:107), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortognonal. Variabel ortognonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di model regresi adalah dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawanya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai  $Tolerance \leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Jika nilai *Tolerance*  $>0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$  maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Model regresi yang baik

yaitu tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel bebas lainnya.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,780	1,282
Sistem Pengendalian Internal	0,798	1,254
Kompetensi Staf Akuntansi	0,640	1,563

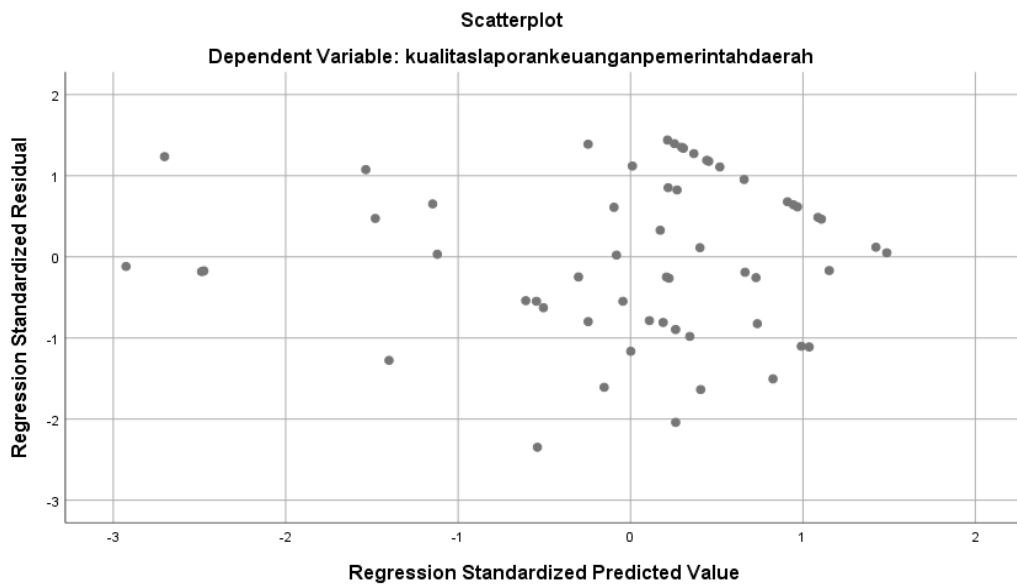
**Sumber : Data Diolah,2019**

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,780 dan nilai VIF sebesar 1,282 selain itu variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,798 dan nilai VIF sebesar 1,254 sedangkan untuk variabel kompetensi staf akuntansi memiliki *tolerance* sebesar 0,640 dan nilai VIF sebesar 1,563. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini karena nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah angka 10.

### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2018:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar analisisnya, apabila titik-titik yang membentuk

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas hanya dengan melihat *scatterplot* dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak dan berikut gambar *scatterplot* :



**Gambar 4.7**

***Scatterplot Uji Heteroskedastisitas***

**Sumber : Data Diolah,2019**

Berdasarkan gambar 4.3 diatas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas atau menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi linear.

#### 4.2.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atau X. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017).

Persamaan regresi linier berganda menggunakan rumus  $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$  dalam hal ini untuk menghitung pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 4.19**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Mode	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	0,838	3,332
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,229	0,089
Sistem Pengendalian Internal	0,366	0,103
Kompetensi Staf Akuntansi	0,414	0,134

Sumber : Data Diolah,2019

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui model regresi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,838 + 0,229X_1 + 0,366X_2 + 0,414X_3$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

$a = 0,838$  artinya konstanta sebesar 0,838 menyatakan bahwa jika tidak ada penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,838.

$b_1 = 0,229$  artinya jika penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) meningkat sebesar (satu) satuan variabel, system pengendalian internal (X2) dan kompetensi staf akuntansi (X3) konstan (benilai 0), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,229. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif.

$b_2 = 0,366$  artinya jika sistem pengendalian internal (X2) meningkat sebesar (satu) satuan variabel, penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan kompetensi staf akuntansi (X3) konstan (benilai 0), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,366. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif.

$b_3 = 0,414$  artinya jika kompetensi staf akuntansi (X3) meningkat sebesar (satu) satuan variabel, penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) konstan (benilai 0), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,414. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel kompetensi staf akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif.

#### 4.2.2.3 Uji Signifikansi t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Signifikansi t (Parsial)**

<b>Model</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
<i>(Constant)</i>	-.251	0,803
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	2,577	0,013
Sistem Pengendalian Internal	3,559	0,001
Kompetensi Staf Akuntansi	3,083	0,003

**Sumber : Data Diolah,2019**

#### 1. Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

$H_0 : \beta_1 = 0$  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,013. Berdasarkan hal tersebut nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menandakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Sistem Pengendalian Internal**

$H_0 : \beta_1 = 0$  Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,001. Berdasarkan hal tersebut nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menandakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **3. Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Kompetensi Staf Akuntansi**

$H_0 : \beta_1 = 0$  Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel kompetensi staf akuntansi sebesar 0,003. Berdasarkan hal tersebut nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menandakan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.2.2.4 Uji Signifikansi F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji F  $P < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Signifikansi F (Simultan)**

Model	F	Sig.
<i>Regression Residual Total</i>	22,290	0,000

**Sumber : Data Diolah, 2019.**

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa hasil perhitungan uji  $F_{hitung}$  sebesar 22,290 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,78. Hasil 2,78 didapat dengan melihat  $F_{tabel}$  dengan rumus  $n-k$  ( $57-3$ ) = 54 nilai 3 didapat dari  $k-1$  ( $4-1 = 3$ ). Dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $22,290 > 2,78$  atau  $p\ value$  menunjukkan  $0,000 < 0,05$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung.

#### 4.2.2.5 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Cara untuk mengetahui presentase pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen dan variabel dependen, maka digunakan rumus koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.22**

**Koefisien Determinasi**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 <sup>a</sup>	.558	.533	2.76701

**Sumber : Data Diolah,2019**

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$= (0,747)^2 \times 100\%$$

= 55,8%

Berdasarkan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa besar nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,558 atau sebesar 55,8%. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi memberikan pengaruh secara simultan atau bersama-sama sebesar 55,8% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Kota Bandung**

##### **4.3.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD Kota Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada SKPD Kota Bandung dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan penerapan standar akuntansi pemerintahan termasuk kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1 tanggapan responden mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan total skor aktual 3144 dan total skor ideal 3420 dengan memperoleh presentase 91,93%. Maka dengan presentase 91,93% penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat dikatakan sangat baik karena kategori garis kontinum 84% - 100% termasuk kategori sangat baik.

Hal ini dapat dikatakan bahwa indikator dari penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu PSAP No.1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP No. 3 tentang laporan arus kas, PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi, PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi, PSAP No. 12 tentang laporan operasional pada SKPD Kota Bandung yang telah berjalan dengan baik dan tepat. Namun dari semua pernyataan atas rekapitulasi jawaban responden, terdapat jawaban ragu-ragu yang diperoleh mengenai Penyajian laporan keuangan (PSAP No. 1), dimana penyusunan laporan keuangan ini tidak selalu disusun dengan menerapkan basis akrual atau basis kas untuk mengakui transaksi atau peristiwa yang terjadi. Selain itu berdasarkan rekapitulasi dari responden terdapat jawaban ragu-ragu mengenai (PSAP No. 02) tentang Laporan Realisasi Anggaran. Dimana hal ini menandakan bahwa instansi tidak selalu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto. Serta jawaban lain yang masih ragu-ragu yaitu mengenai Pencatatan atas Laporan Keuangan (PSAP No. 04) yaitu hasil dari jawaban responden menandakan bahwa tidak selalu menyajikan informasi secara lengkap mengenai tentang penjelasan atas pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan. Berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner tersebut, mengakibatkan adanya ketidaksesuaian mengenai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keadaan tersebut menandakan bahwa belum memaksimalkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **4.3.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pada SKPD Kota Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada SKPD Kota Bandung dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan sistem pengendalian internal termasuk kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 tanggapan responden mengenai sistem pengendalian internal dengan total skor aktual 2598 dan total skor ideal 2850 memperoleh presentase 91,16%. Maka dengan presentase 91,16% sistem pengendalian internal dapat dikatakan sangat baik karena kategori garis kontinum 84%-100% termasuk kategori sangat baik.

Hal ini dapat dikatakan bahwa indikator sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang terdapat pada SKPD Kota Bandung telah berjalan dengan baik dan tepat. Namun dari semua pernyataan, terdapat jawaban ragu-ragu dari responden mengenai Penilaian Risiko, dimana pimpinan tidak selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya analisis risiko yang dilakukan tidak secara lengkap dan menyeluruh yang dilakukan oleh pimpinan, sehingga dikhawatirkan sering timbulnya pelanggaran atau risiko terhadap sistem akuntansi. Selain itu, pimpinan harus meningkatkan pengelolaan terhadap sistem dan prosedur akuntansi yang ada pada SKPD Kota Bandung.

#### **4.3.1.3 Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada SKPD Kota Bandung dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kompetensi staf akuntansi termasuk kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pada gambar 4.3 tanggapan responden mengenai kompetensi staf akuntansi dengan total skor aktual 1569 dan total skor ideal 1710 dengan presentase 91,75%. Maka dengan presentase 91,75% kompetensi staf akuntansi dapat dikatakan sangat baik karena kategori 84%-100% termasuk kategori sangat baik.

Hal ini dapat dikatakan bahwa indikator kompetensi staf akuntansi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), perilaku (*attitude*) yang dimiliki oleh pegawai SKPD Kota Bandung telah berjalan dengan baik. Namun dari semua pernyataan, terdapat jawaban ragu-ragu dari responden yaitu pada pernyataan mengenai indikator keahlian. Hal tersebut menandakan bahwa SKPD terkait tidak mampu atau tidak yakin mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Selain itu, hal tersebut juga menandakan bahwa SKPD tidak selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.

#### **4.3.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Kota Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada SKPD Kota Bandung dapat dikatakan secara keseluruhan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.4 tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan total skor aktual 2108 dan total skor ideal 2280 dengan presentase

92,46%. Maka dengan presentase 92,46% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan sangat baik karena kategori garis kontinum 84%-100% termasuk kategori sangat baik.

Hal ini dapat dikatakan bahwa indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pada SKPD Kota Bandung telah berjalan dengan baik. Namun dari semua pernyataan, terdapat jawaban responden yang masih belum diyakini kebenarannya (ragu-ragu) pada indikator andal yaitu informasi yang disajikan digunakan sesuai dengan kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus. Keadaan tersebut merupakan penyebab utama Kota Bandung masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau dapat dikatakan tidak memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Bandung tahun 2018 terkait masalah asset yang tidak diketahui keberadaannya hingga pencatatan utang jangka pendek yang tidak rinci. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

### **4.3.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

#### **4.3.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,013. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Bastian (2010:137) Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Selain itu menurut Nordiawan dkk. (2009:25) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu: “SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah”.

Berdasarkan penelitian Sihite dan Holiawati (2017), mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Tangerang selatan. Hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2010), menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena bertujuan untuk mencatat suatu tujuan pemerintah daerah. Dengan cara meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan prinsip *good governance* untuk mengelola keuangan daerah.

Sedangkan menurut penelitian Pasha (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014), penerapan standar akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena pada penerapannya, hasil laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tidak mempunyai perbedaan yang cukup berarti dengan standar akuntansi pada umumnya. Selain itu hampir semua standar akuntansi baik itu SAK dan IFRS diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal itu dikarenakan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan dengan baik guna mempermudah dalam pengolahan data keuangan (akuntansi),

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan.

#### **4.3.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,001. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikan  $< 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Penelitian Mahayani dkk. (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusvianto., dkk (2018), bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga menurut Aditya (2017), sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta., Dkk (2017), sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian tersebut sistem pengendalian internal apabila sudah diterapkan dengan baik, namun belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, yang dimiliki SKPD Kota Bandung akan mempermudah dalam pengolahan data keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan.

#### **4.3.2.3 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel kompetensi staf akuntansi sebesar 0,003. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan

keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dkk, 2014).

Jadi dapat diketahui bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan adanya kompetensi staf akuntansi yang dimiliki oleh pegawai bagian akuntansi (keuangan) pada SKPD Kota Bandung akan mempermudah dalam pengolahan data keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik yaitu yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan.

#### **4.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,000 nilai lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%) yaitu  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa  $H_0 =$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti penerapan standar

akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jika penerapan standar akuntansi pemerintahan telah sesuai dengan PSAP No.1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP No. 3 tentang laporan arus kas, PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi, PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi, PSAP No. 12 tentang laporan operasional. Selain itu, sistem akuntansi yang digunakan sesuai dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Serta para pegawai SKPD Kota Bandung memiliki kompetensi yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), perilaku (*attitude*) yang mana akan mempermudah proses pengolahan data keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggungjawaban saja, tetapi laporan keuangan juga dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, sehingga kualitas laporan keuangan sangat penting dalam menunjang pengambilan keputusan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi pada SKPD Kota Bandung :
  - a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Kota Bandung termasuk kategori sangat baik, artinya SKPD Kota Bandung telah memiliki dan menjalankan dengan baik penerapan standar akuntansi pemerintahan. Namun dari rekapitulasi yang diperoleh atas jawaban kuesioner terdapat beberapa jawaban yang menandakan ketidakpastian atau ragu-ragu yaitu, mengenai PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Dimana hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak selalu disusun dengan menerapkan basis kas dan basis akrual. Selain itu jawaban ragu-ragu lainnya yaitu, mengenai PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa instansi tidak selalu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto. Serta jawaban ragu-ragu lainnya

yaitu, mengenai PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan atas pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.

- b. Sistem Pengendalian Internal pada SKPD Kota Bandung termasuk kategori sangat baik, artinya Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki oleh SKPD Kota Bandung telah dimiliki dengan baik. Namun dari semua pernyataan, terdapat jawaban ragu-ragu mengenai indikator penilaian risiko. Karena masih kurangnya analisis risiko yang dilakukan tidak secara lengkap dan menyeluruh yang dilakukan oleh pimpinan yang ada pada SKPD Kota Bandung.
- c. Kompetensi Staf Akuntansi pada SKPD Kota Bandung termasuk kategori sangat baik, artinya kompetensi staf akuntansi yang dimiliki pegawai pada SKPD Kota Bandung telah dimiliki dengan baik. Namun dari semua pernyataan, terdapat jawaban responden yang ragu-ragu yaitu pada indikator keahlian (*skill*) dengan demikian dapat dikatakan masih kurangnya kompetensi staf akuntansi pada para pegawai SKPD Kota Bandung.
- d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung termasuk kategori sangat baik. Namun dari semua pernyataan, terdapat skor tanggapan terendah pada indikator. Keadaan tersebut merupakan penyebab utama Kota Bandung masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Bandung tahun 2018

terkait dengan masalah aset yang tidak diketahui keberadaannya hingga pencatatan utang jangka pendek yang tidak rinci.

2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya penerapan standar akuntansi pemerintahan hal tersebut menandakan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung.
  - b. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya sistem pengendalian internal dalam hal ini lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung.
  - c. Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada SKPD Kota Bandung. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya kompetensi staf akuntansi dalam hal pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), perilaku (*attitude*) yang dimiliki masing-

masing pegawai pada SKPD Kota Bandung. Maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung.

3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung. Hal ini dapat dikatakan semakin meningkatnya penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi pada SKPD Kota Bandung maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan meningkat juga.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung :
  - a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD Kota Bandung sudah sangat baik, namun berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa SKPD Kota Bandung perlu meningkatkan pencatatan ataupun penilaian atas aset tetap berdasarkan biaya perolehan dan klasifikasi aset tetap berdasarkan fungsinya dalam operasi entitas, meningkatkan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis kas atau basis akrual,

meningkatkan penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan basis kas atau pendapatan dicatat sesuai dengan asas bruto, selain itu meningkatkan Pencatatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan kesesuaian mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- b. Sistem Pengendalian Internal Pada SKPD Kota Bandung sudah termasuk kategori sangat baik, namun berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa SKPD Kota Bandung perlu meningkatkan penilaian terhadap risiko yang akan timbul sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap sistem akuntansi. Selain itu, pimpinan harus meningkatkan pengelolaan terhadap sistem dan prosedur akuntansi yang ada pada SKPD Kota Bandung.
- c. Kompetensi Staf Akuntansi Pada SKPD Kota Bandung sudah termasuk kategori sangat baik, namun berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa SKPD Kota Bandung perlu meningkatkan Kompetensi terhadap para pegawai (khususnya pada bidang akuntansi atau keuangan) dengan cara meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) yaitu dengan cara *upgrade* pengetahuan para pegawai dalam bidang akuntansi.
- d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung sudah termasuk kategori sangat baik, namun berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner dari responden menyatakan bahwa SKPD Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara melakukan penyusunan laporan

keuangan yang teliti dengan artian bahwa informasi yang disajikan digunakan sesuai dengan kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masing-masing pegawai pada SKPD Kota Bandung. Selain itu juga lebih mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Asset Tetap (SIMANTAP) pada semua SKPD Kota Bandung, agar permasalahan aset dapat diatasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dan akan melakukan penelitian dengan mengambil tema yang sama atau penelitian yang sama, disarankan dapat menguji variabel-variabel lain seperti (Komitmen Organisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan) yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggunakan variabel lain yang berbeda dengan variabel dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya di harapkan dapat memperluas populasi dan memperbanyak sampel dan bisa meneliti di lokasi atau unit analisis yang berbeda untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abel, J. P., dan Cheryl, L. B. (2016), *Social media and fear of missing out: scale development and assesment. Journal of Business & Economics Research*, 14(1), 33-43.
- Adhi, D.K, dan Yohanes S. (2013), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5, No.3, Oktober 2013.
- Aditya, R, O. (2017), *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 (No. 1), 2017, hal 49-62.
- Agoes, S. (2012), “*Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*”, Jilid 1, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, I. (2010), *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- COSO. (2013), *Internal Control-Integrated Framework : Executive Summary*, Durhan, North Carolin, May 2013.
- Deriana. (2018), pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
- Desipradani, G. (2018), Variabel Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 18. No. 2, Desember, 2018.
- Elsye, R., Suwanda, D., Muchidin., U. (2016), *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Firman, G, D. (2017), “Pengaruh Penerapan Standar Pemerintahan Indonesia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan (Survey pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)”. Vol. 3, No. 4.
- Ghozali, I. (2016), Aplikasi *Analysis Multivariate* dengan Program IBM SPSS 23,Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Heni, N., H, dan Euis, E., S. (2014), “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Barat”.
- Hersona, S., Rismayadi, B., dan Mariah, S. (2012), Analisis Pengaruh Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang.
- Hutapea, Parulian dan Thoha. (2008), Kompetensi Komunikasi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ihsanti, E. (2014), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I. (2018), Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I. (2019), Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Jannaini, Y. (2012), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Kamil, R. (2019), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. <http://ayobandung.com>. Ridwan.Kamil.2019, diunduh pada tanggal 27 September 2019.
- Kamil. R. (2019), *Knowledgebase* atas Peraturan Wali Kota 2016 Kota Bandung. <https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/peraturan-wali-kota-nomor-1407-tahun-2016-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-kecamatan-dan-kelurahan-di-lingkungan-pemerintah-kota-bandung/>, diunduh pada tanggal 20 November 2019.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 tentang kompetensi.

- Ladjandu, I., Kalangi, L., dan Tinangon, J. J. (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Taulid.
- Mahayani, L, P, N., Sulindawati, E, L, N., dan Dewi, M, D, E, P. (2017), “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Mahmudi. (2011), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mokoginta, N., Lambey, L., dan Pontoh, W. (2017), Pengaruh Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12, No. 2, 2017, 874-890.
- Mulyani. S. (2019), Perkembangan LKPD Kota Bandung. <http://ekonomi.kompas.com.Sri.Mulyani.2019>, diunduh pada tanggal 27 September 2019.
- Narimawati, U. (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Bandung: Agung Media.
- Nazrin, M, P. (2017), Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 4, No. 1 februari 2017.
- Nordiawan, D., Putra, S, I., dan Rahmawati., M. (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, P., dan Subaweh, I. (2010), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 13, No. 1, April 2010.
- Pasha, K, A. (2018), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Rahmadani, S. (2015), pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jom FEKOM*. Vol. 2, No. 2, hlm. 1-15.
- Ridwan dan Kuncoro, E.A. (2014), Cara Mudah Menggunakan dan Memaknai *Path Analysis* (Analisis Jalur), Bandung: Alfabeta.
- Ruky, S. A. (2014), *Sistem Manajemen Kinerja*, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., dan Yuliafitri, I. (2018), Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sari, D. (2013), "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", Skripsi Universitas Padjajaran, *Indonesian Journal of Economics and Bussiness*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013.

- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta:Salemba Empat.
- Setyowati, L., Isthika, W., Pratiwi, D, R. (2016), Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang. *Jurnal Kinerja*, Vol. 20, No. 2, Halaman 179-191.
- Sihite, N, R., dan Holiawati. (2017), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9 (2), 2017, 81-92.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MixedMethods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sulfiyah, F. (2018), *Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Sundari, H., dan Rahayu, S. (2019), Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Susanto, A. (2017), *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutawan, E, M, I., Darmawan, S, A, N., dan Yuni, A, G. (2015), Pengaruh Stres Kerja, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Pada Koperasi di Kabupaten Buleleng). *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015.
- Suwardjono. (2012), *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan* , Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Syifa. A. (2019), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. <http://ayobandung.com.Arman.Syifa.2019>, diunduh pada tanggal 27 September 2019.
- Syifa. A. (2019), Perkembangan Opini LKPD Kota Bandung Perwakilan Jawa Barat. <http://kumparan.com.Arman.Syifa.2019>, diunduh pada tanggal 27 September 2019.

Udiyanti, N, L., Anantawikrama, T, A., dan Nyoman, A, S. (2014), “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “(Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng)”. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wibowo. (2016), *Manajemen Kinerja*, Edisi Kelima. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Yunita, T. Asri. (2015), “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)”. Pekanbaru:Jom FEKON Vol. 2, No. 2.